

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 1997, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 427.
- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 97.
- Abdullah, Rozalli. *Hukum Acara PERATUN*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basah, Sjachran. *Hukum Acara Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm 1.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 2.
- Hadjon Philipus M, 1993, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Jakarta: Yuridika, hlm. 55.
- Hadjon. Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 324.
- Hadjon, Philipus M. et.al 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 22.
- Hadjon, Philipus M. et.al 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. hlm. 25-26.
- Harahap, Zairin. 2007 *Hukum Acara PERATUN*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2-3
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 18-19.
- H.R, Ridwan. 2010 *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Yogyakarta, hlm. 161-162

- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PERATUN*. Buku II, Cetakan ke-IV. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S.F. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.
- Marzuki, Peter Mahmud S.H.,M.H.,LL.M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*. Edisi Baru, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 348.
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara PERATUN*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara PERATUN*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Firna Novi, Anggoro. 2016, “*Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN (Testing the Element Abuse of Authority toward Decision and/or Government Officials Act by Court Administrative)*”, Vol. 10 No. 4, Fiat Justisia, Lampung: Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, hlm. 657.
- Rini, Nicken Sarwo 2016, “*Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I., hlm. 260.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4899)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN JKT